

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah wilayah mengacu pada pengertian unit geografis didefinisikan sebagai suatu unit geografis dengan batas-batas tertentu dimana komponen-komponen didalamnya memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional satu dengan yang lainnya, dimana komponen-komponen tersebut memiliki arti di dalam pendiskripsian perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pembangunan. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional (UU Nomor 24 Tahun 1992: Penataan Ruang). Dari definisi tersebut, terlihat bahwa tidak ada batasan spesifik dari luasan suatu wilayah, batasan yang ada lebih bersifat *meaningfull* untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengendalian, maupun evaluasi, dengan demikian batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi lebih bersifat dinamis (Ernan Rustiadi, Dkk, 2011).

Konsep wilayah menurut Richadson, (1969); Hagget, Cliff dan Frey, (1997) membagi wilayah kedalam tiga katagori atau sering dikenal dengan tipologi wilayah yaitu : (1) Wilayah Homogen (*uniform* atau *homogeneous region*), (2) Wilayah nodal, dan (3) Wilayah Perencanaan (*planning region*). Cara klasifikasi konsep wilayah ini ternyata kurang mampu menjelaskan keragaman konsep wilayah yang ada. Blair (1991), memandang konsep wilayah nodal terlalu sempit untuk menjelaskan fenomena yang ada dan cenderung menggunakan konsep fungsional. Sedangkan menurut Ernan rustiadi dkk. (2011) kerangka konsep wilayah yang lebih mampu menjelaskan berbagai konsep wilayah yang dikenal selama ini adalah : (1) wilayah *homogeny (uniform)*, (2) wilayah sistem/fungsional, dan (3) wilayah perencanaan/pengelolaan (*planning region* atau *programing region*). Dalam pendekatan klasifikasi konsep wilayah ini, wilayah nodal dipandang sebagai salah satu bentuk konsep wilayah sistem. Sedangkan dalam kelompok konsep

wilayah perencanaan terdapat konsep wilayah administratif-politis dan konsep wilayah fungsional (Lutfi muta'ali,2011).

Pada dasarnya pembagian wilayah dimaksudkan untuk mempermudah dalam pengelolaannya, sehingga kedepannya dapat membantu dalam upaya pengembangan wilayah tersebut. Prinsip dasar pengembangan wilayah adalah untuk mengatasi ketimpangan perkembangan baik secara fisik maupun non fisik di suatu wilayah, selain itu pembagian wilayah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan lebih bagi suatu wilayah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga di wilayah tersebut muncul pusat-pusat pertumbuhan yang dapat mendorong proses pembangunan di wilayah tersebut.

Berlakunya otonomi daerah yang paling penting bagi pembangunan daerah dewasa ini adalah meningkatkan motivasi daerah untuk memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi, melalui pemberdayaan potensi ekonomi lokal dengan mengembangkan kegiatan yang berdasarkan potensi daerah dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan daerah yang memiliki potensi ekonomi lokal yang melimpah akan semakin kaya, sedangkan daerah yang memiliki potensi ekonomi lokal yang terbatas akan semakin miskin. Apabila kondisi tersebut dibiarkan maka akan semakin meningkatkan kesenjangan antardaerah karena kegiatan ekonomi akan menumpuk di daerah tertentu, sedangkan daerah lain akan semakin ketinggalan. Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan suatu daerah. Akibat dari perbedaan ini kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga berbeda. Karena itu pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah relatif maju (*developed region*) dan wilayah relatif terbelakang (*underdeveloped region*) (Retno Zulaechah,2011).

Potret kondisi diatas salah satunya terjadi di Kabupaten Boyolali, dimana kecamatan yang dijadikan sebagai pusat kegiatan ekonomi memiliki laju pertumbuhan yang lebih tinggi dari kecamatan yang tidak dijadikan pusat kegiatan ekonomi, karena hampir semua infrastruktur yang menunjang kegiatan ekonomi (mulai dari pasar input maupun output) ada di kecamatan tersebut. Akibatnya laju

pertumbuhan ekonomi di kecamatan tersebut lebih tinggi dari pada kecamatan yang lainnya, hal ini dapat dilihat dari perbedaan PDRB per kapita seperti dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlakudi Kabupaten Boyolali Tahun 2007-2011 di Rinci Tiap Kecamatan (Rp).

No	Kecamatan	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Selo	5.937.457,08	6.674.087,63	7.409.522,85	8.477.591,63	9.348.090,84
2.	Ampel	6.338.976,48	6.956.396,98	7.631.362,22	8.606.721,02	9.584.680,52
3.	Cepogo	6.436.939,46	7.159.971,19	7.826.950,39	8.844.315,46	9.780.237,88
4.	Musuk	5.690.114,61	5.970.950,09	6.633.885,07	7.588.410,78	8.357.318,18
5.	Boyolali	7.945.662,09	8.762.881,70	9.654.343,16	10.890.864,24	12.157.318,59
6.	Mojosongo	5.387.617,86	6.212.556,24	6.875.238,34	7.813.754,39	8.652.231,68
7.	Teras	10.682.793,28	11.759.902,80	12.628.211,82	13.840.319,80	15.426.752,12
8.	Sawit	6.547.303,33	7.556.330,11	8.367.915,24	9.435.662,16	10.560.587,22
9.	Banyudono	12.254.711,22	13.250.910,37	14.461.631,85	16.082.704,71	18.056.373,04
10.	Sambi	5.067.033,80	5.913.041,76	6.614.582,88	7.589.081,02	8.402.612,61
11.	Ngemplak	4.199.135,01	4.866.891,77	5.368.091,97	6.078.875,17	6.726.427,77
12.	Nogosari	5.077.638,31	5.841.015,48	6.513.268,45	7.448.164,60	8.241.000,98
13.	Simo	6.480.959,26	7.482.661,95	8.311.123,03	9.491.464,06	10.585.581,14
14.	Karanggede	5.922.489,02	7.221.599,99	8.009.190,95	9.151.746,79	10.178.988,42
15.	Klego	4.820.421,02	5.671.468,75	6.312.992,53	7.186.546,81	7.956.295,66
16.	Andong	4.531.027,04	5.110.245,13	5.640.740,67	6.459.846,16	7.175.287,08
17.	Kemus	4.012.374,23	4.618.741,94	5.111.673,03	5.858.512,76	6.484.246,55
18.	Wonosegoro	4.487.593,73	5.345.600,45	5.905.364,98	6.756.509,26	7.470.025,23
19.	Juwangi	4.357.472,76	5.072.511,10	5.599.749,31	6.428.762,75	7.120.303,54

Sumber: PDRB Kab. Boyolali Tahun 2007-2011.

Pada table 1 dapat dilihat dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2007 – 2011 pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga yang berlaku dapat diketahui bahwa kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan memiliki pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan lain. Sebagai contoh adalah

dalam kasus satuan wilayah pengembangan (SWP), yang membagi Kabupaten Boyolali menjadi empat SWP dan dipilih satu Kecamatan yang dijadikan sebagai pusat SWP. Kecamatan Boyolali, Kecamatan Banyudono, Kecamatan Simo, dan Kecamatan Karanggede yang dahulu merupakan pusat dari tiap SWP memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan lain yang ada dalam SWP tersebut.

Setiap daerah perlu mengidentifikasi dan menganalisis potensi wilayah terutama berbasis keunggulan lokal. Identifikasi potensi wilayah merupakan aktivitas mengenal, memahami dan merinci secara keseluruhan potensi (SDA & SDM) yang dimiliki wilayah baik yang telah dimobilisir maupun yang belum dimobilisir yang dapat mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah yang bersangkutan dan atau wilayah lain. Bagaimana suatu daerah melakukan penggalian atas sumber-sumber daya yang dimilikinya, sehingga daerah tersebut memiliki kemampuan untuk menjadi unggul.

Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk menciptakan keseimbangan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita antardaerah yaitu dengan penerapan kebijakan pembangunan daerah melalui konsep kawasan strategis, sehingga upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan, tetapi kesenjangan antardaerah diharapkan dapat dipersempit. Pengelompokan dilakukan sebagai salah satu strategi dasar dalam melakukan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi wilayah. Diharapkan dengan adanya pembagian ini, masing – masing daerah dalam suatu kawasan kerjasama akan saling berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan. Untuk memperoleh hasil dan manfaat yang besar mendorong laju pertumbuhan daerah berdasarkan rencana tata ruang Kabupaten Boyolali tahun 2011-2031 telah mengarahkan bahwa untuk pemerataan pembangunan wilayah maka dibentuk fungsi pusat pelayanan di Kabupaten Boyolali yaitu sebagai berikut:

- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi Kecamatan Boyolali.
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi Kecamatan Ampel.
- Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), meliputi Kecamatan Mojosongo, Banyudono, Simo dan Karanggede.

- Pusat Kegiatan Kawasan (PKK), meliputi Kecamatan Teras, Sambu, Ngemplak.
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), meliputi Kecamatan Selo, Cepogo, Musuk, Sawit, Nogosari, Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro, dan Kecamatan Juwangi.

Sumber: Bappeda Kabupaten Boyolali

Kebijakan lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah adalah melalui pengembangan pusat pertumbuhan (*growth poles*) secara tersebar. Kebijakan ini diperkirakan akan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah, karena pusat pertumbuhan tersebut menganut konsep konsentrasi dan desentralisasi secara sekaligus. Aspek konsentrasi diperlukan agar penyebaran kegiatan ekonomi tersebut dapat dilakukan dengan masih terus mempertahankan tingkat efisiensi usaha yang sangat diperlukan dalam pengembangan usaha tersebut. Sedangkan aspek desentralisasi diperlukan agar penyebaran kegiatan pembangunan antar daerah dapat dilakukan sehingga ketimpangan pembangunan antarwilayah akan dapat dikurangi (Sjafrizal, 2012).

Kabupaten Boyolali memiliki peran yang sangat strategis sebagai penggerak roda perekonomian regional Jawa Tengah karena berada di jalur transportasi segitiga wilayah Yogyakarta-Solo-Semarang, dimana daerah tersebut sedang berkembang. Mencermati perkembangan perekonomian Kabupaten Boyolali sebagaimana diuraikan diatas maka menarik untuk mengkaji dan menganalisis potensi dan daya saing tiap kecamatan sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah dengan daerah sekitarnya yang berada pada satu kawasan tersebut dan menganalisis mengenai pengembangan sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan berdasarkan potensi dan permasalahan sumber daya wilayah yang ada menjadi *leading sector* bagi Kabupaten Boyolali, sehingga Kabupaten Boyolali dapat menjadi *prime mover* untuk daerah sekitarnya. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul “ANALISIS PUSAT PERTUMBUHAN PADA SETIAP FUNGSI PUSAT PELAYANAN DI KABUPATEN BOYOLALI”.

1.2 Rumusan Masalah

Pengembangan kebijakan fungsi pusat pelayanan memiliki dua arah yaitu mengidentifikasi potensi ekonomi dan potensi wilayah. Untuk pengembangan tersebut ada beberapa permasalahan yang perlu diketahui jawabannya, permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pertumbuhan ekonomi setiap Kecamatan di Kabupaten Boyolali?
2. Sektor apa sajakah yang mejadi unggulan di tiap Kecamatan di Kabupaten Boyolali?
3. Kecamatan mana saja yang menjadi pusat pelayanan di Kabupaten Boyolali.
4. Bagaimana potensi dan daya saing masing-masing kecamatan sebagai prioritas pusat pertumbuhan di Kabupaten Boyolali?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dibuat tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan pola pertumbuhan setiap Kecamatan di Kabupaten Boyolali.
2. Mengetahui sektor apa saja yang menjadi unggulan di tiap Kecamatan di kabupaten Boyolali.
3. Mengidentifikasi pusat pelayanan di Kabupaten Boyolali.
4. Menganalisis potensi daya saing masing-masing kecamatan sebagai prioritas pusat pertumbuhan di Kabupaten Boyolali.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata 1 Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah kabupaten boyolali dalam mengambil kebijakan pembangunan Kecamatan di daerah penelitian.
3. Sebagai bahan refrensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya yang mencakup tentang studi kewilayahan.

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1 Telaah Pustaka

1.5.1.1 Ruang dan pewilayahan

Menurut Bintarto (1987) geografi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kaitan antara manusia, ruang, ekologi, kawasan dan perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat dan kaitan antar komponen-komponen tersebut, melalui pendekatan keruangan (*spatial approach*), pendekatan ekologi (*ecological approach*), dan pendekatan kompleks wilayah (*region complex approach*), untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan.

Menguraikan definisi ilmu geografi sebagai ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan, maka akan muncul 9 tema dalam pendekatan keruangan dalam kajian geografi sebagai ciri ilmu dan pengajaran geografi. Kesembilan tema dalam analisis keruangan antara lain:

- a. Analisis Pola Keruangan, penekanan utama dari analisis ini adalah pada sebaran elemen-elemen pembentuk ruang. Tahap awal adalah identifikasi mengenai aglomerasi sebarannya dan kemudian dikaitkan dengan upaya untuk menjawab *geographic question*, antara lain: *What, Where, When, why, Who, dan How*.
- b. Analisis Struktur Keruangan, menekankan pada analisis susunan elemen-elemen pembentuk ruang. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa struktur elemen-elemen keruangan dapat dikemukakan dari berbagai fenomena baik fenomena fisik maupun non fisik
- c. Analisis Proses Keruangan, menekankan pada proses keruangan yang biasanya divisualisasikan pada perubahan ruang. Perubahan elemen-elemen pembentuk ruang dapat dikemukakan secara kualitatif dan kuantitatif. Setiap analisis perubahan keruangan tidak dapat dilaksanakan tanpa mengemukakan dimensi kewaktuannya, maka dimensi temporal mempunyai peranan utama dalam hal ini.

- d. Analisis Interaksi Keruangan, menekankan pada interaksi antar ruang. Hubungan timbal balik antara ruang yang satu dengan yang lain mempunyai variasi yang sangat besar, sehingga upaya mengenali factor-faktor pengontrol interaksi menjadi sedemikian penting. Tahap kemudian adalah menjawab mengapa terjadi interaksi dan bagaimana interaksi tersebut terjadi.
- e. Analisis Organisasi Keruangan, bertujuan untuk mengetahui elemen-elemen lingkungan mana yang berpengaruh terhadap terciptanya tatanan spesifik dari elemen-elemen pembentuk ruang. Penekanan utamanya pada keterkaitan antara kenampakan yang satu dengan yang lain serta keterkaitan / hubungan antar elemen dan hierarki peranan elemen secara individual.
- f. Analisis Asosiasi Keruangan, bertujuan untuk mengungkapkan terjadinya asosiasi keruangan antara berbagai kenampakan pada suatu ruang. Apakah ada keterkaitan fungsional atas sebaran keruangan atau gejala tertentu dengan sebaran keruangan gejala yang lain. Untuk mengetahui ada atau tidaknya asosiasi keruangan antara variable satu dengan variable lain dapat dilaksanakan dengan analisis yang mendasarkan pada visualisasi data pada peta ataupun dapat dilaksanakan dengan metode analisis statistic.
- g. Analisis Komparasi keruangan, merupakan suatu analisis yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan atau keunggulan suatu ruang dibandingkan dengan ruang yang lain. Hal ini sangat penting dilaksanakan dalam studi banding yang mendalam mengenai suatu wilayah dalam rangka mempelajari kelebihan-kelebihan wilayah lain untuk digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan pengembangan wilayah, sehingga wilayahnya dapat mengalami kemajuan yang lebih besar.
- h. Analisis Kencenderungan Keruangan, adalah suatu analisis yang menekankan pada upaya mengetahui kecenderungan perubahan suatu

gejala. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan *space based analysis*, *time based analysis* maupun gabungan antara keduanya.

- i. Analisis Sinergititas Keruangan, merupakan perkembangan baru yang saat ini menjadi sorotan ilmu pengetahuan, karena sangat terkait dengan erat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi. Makin majunya system transportasi dan komunikasi telah memungkinkan terjadinya mobilitas barang, jasa, informasi yang semakin tinggi pula, sehingga dinamika keruangan semakin tinggi pula (Yunus, 2010).

Untuk dapat mewujudkan analisis yang baik dan harmonis, konsep wilayah digunakan sebagai representasi ruang. Dalam hal ini, wilayah diartikan sebagai suatu kesatuan ruang yang dikelompokkan berdasarkan unsur tertentu tergantung dari tujuan analisis. Menurut Ernani Rustiadi dkk. (2011) membagi konsep wilayah menjadi tiga yaitu: (1) wilayah *homogeny (uniform)*, (2) wilayah sistem/ fungsional, dan (3) wilayah perencanaan / pengelolaan (*planning region atau programming region*). Dalam pendekatan klasifikasi konsep wilayah ini, wilayah nodal dipandang sebagai salah satu bentuk konsep wilayah sistem. Sedangkan dalam kelompok konsep wilayah perencanaan terdapat konsep wilayah administratif-politis dan konsep wilayah fungsional (Lutfi Muta'ali, 2011).

Pewilayahan adalah usaha membagi-bagi permukaan bumi atau bagian bumi tertentu untuk tujuan tertentu pula. Tujuan pewilayahan dalam kaitannya dengan perencanaan pengembangan wilayah bertujuan:

1. Menyebarkan pembangunan-pembangunan sehingga dapat dihindarkan terjadinya pemusatan kegiatan pembangunan yang berlebihan di daerah tertentu.
2. Menjamin keserasian dan koordinasi antar berbagai kegiatan pembangunan yang ada di daerah-daerah.
3. Memberikan pengarahan kegiatan pembangunan, bukan saja pada aparat pemerintah baik pusat maupun daerah, tetapi juga kepada masyarakat umum dan kepada pengusaha (Sumarmi, 2012).

1.5.1.2 Teori Lokasi pertumbuhan

Teori lokasi pertumbuhan merupakan cabang ilmu ekonomi regional paling tua yang dikembangkan sejak abad kesembilan belas oleh H.W. Richardson. Teori ini diilhami oleh pertanyaan Weber, yaitu pertanyaan mengapa pabrik-pabrik cenderung berlokasi saling berdekatan. Teori lokasi adalah teori yang menjelaskan di mana dan bagaimana suatu aktivitas ekonomi memilih lokasinya secara optimal. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut adalah penting bagi para pengambil keputusan publik, perencana lembaga-lembaga perdagangan eceran (yang ingin membuat pilihan lokasi yang tepat) maupun pengembang-pengembang komunitas serta real estate, yang berharap untuk dapat menarik bisnis ke kawasan-kawasan mereka (Soepono dalam Sutikno dan Maryati, 2007).

Dengan demikian lokasi perusahaan-perusahaan atau kegiatan ekonomi memerankan peranan penting bagi lokasi daerah/kota. Keputusan-keputusan lokasi perusahaan-perusahaan dan aktivitas ekonomi seharusnya menyebabkan timbul dan berkembangnya kota-kota dan daerah-daerah. Faktor-faktor lokasi menurut Soepono, dapat dikelompokkan menjadi dua orientasi yaitu, pertama, orientasi transportasi, yang dimaksud dengan orientasi transportasi adalah bahwa transportasi merupakan porsi terbesar dari biaya total dari organisasi suatu aktivitas ekonomi, sehingga menjadi penentu keputusan lokasi. Faktor-faktor lokasi yang berorientasi transportasi antara lain; faktor transportasi, faktor sumberdaya, faktor pasar, dan faktor tenaga kerja. Kedua, orientasi masukan lokal, yang dimaksud dengan orientasi masukan lokal adalah bahwa masukan lokal itulah yang merupakan persentase terbesar dari biaya total dan disebut lokal bila input itu tidak dapat secara efisien diangkut dari lokasi satu ke lokasi lain.

1.5.1.3 Teori Kutub Pertumbuhan

Teori *growth pole* dari Francois Perroux mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak menyebar dengan sendirinya ke seluruh wilayah tersebut secara merata namun dipengaruhi oleh adanya

perkembangan teknologi dan inovasi yang pada umumnya dikembangkan oleh industri-industri atau perusahaan-perusahaan yang cenderung beraglomerasi di tempat-tempat tertentu. Inti dari teori kutub pertumbuhan ini dapat dijabarkan sebagai berikut; 1) Dalam proses pembangunan akan timbul industri unggulan yang merupakan roda penggerak utama dalam pembangunan perekonomian di suatu wilayah. 2) Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian suatu wilayah, sehingga perkembangan industri di daerah tersebut akan mempengaruhi perkembangan wilayah disekitarnya. 3) Perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif pasif yaitu industri yang tergantung dengan pusat pertumbuhan/industri unggulan dengan industri yang relatif aktif (industri unggulan). Daerah yang relatif maju/aktif akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif (Lutfi Muta'ali, 2011).

Menurut Badrudin (1999), terdapat dua hal penting yang berkaitan dengan kutub pertumbuhan: pertama, kutub pertumbuhan merupakan sekelompok kegiatan industri yang mempunyai keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) yang kuat terhadap sebuah industri yang unggul, sehingga akan mempunyai kemampuan untuk menggerakkan aktivitas perekonomian dan sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Kedua, kelompok industri tersebut akan berupaya memilih lokasi pada kota-kota besar dengan mempertimbangkan kemudahan berbagai prasarana dan fasilitas, namun tetap memperhatikan hubungan dengan daerah pendukung (*hinterland*) sebagai salah satu pemasok input atau sumber daya, konsep ini dikenal dengan aglomerasi ekonomi.

Sedangkan Myrdal menekankan analisisnya kepada faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya ketidakseimbangan di berbagai daerah, pembangunan yang terpolarisasi akan menimbulkan dampak balik (*spread effect*) yaitu semua perubahan yang merugikan dari ekspansi ekonomi di suatu wilayah karena sebab-sebab diluar wilayah tersebut, serta dampak sebar (*backwash effect*) yaitu

dampak momentum pembangunan di suatu wilayah yang memberikan keuntungan ekonomi ke tempat-tempat lainnya(Sutikno dan Maryati,2007).

1.5.2 Penelitian Sebelumnya

Didit Hasto Hendratmoko (2005) dengan penelitiannya yang berjudul Kajian Tingkat Perkembangan Wilayah Untuk Pemilihan Wilayah Prioritas Pengembangan di Kabupaten Wonogiri, bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat perkembangan dan pola persebaran perkembangan wilayah serta untuk mengetahui wilayah prioritas untuk dikembangkan di Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data sekunder dengan hasil penelitian yang menunjukan terjadi kesenjangan wilayah di Kabupaten Wonogiri. Terjadi kesenjangan wilayah di Kabupaten Wonogiri hal ini ditunjukkan dari perbedaan nilai variable yang menyebabkan tingkat perkembangan wilayah yang berkatagori maju dan tertinggal sangatlah mencolok. Hasil perhitungan dengan menggunakan indeks Gini terhadap wilayah dengan perkembangan sedang adalah sebesar 0,95, wilayah dengan perkembangan rendah 0,96 angka tersebut mendekati angka 1 yang berarti pola persebaran wilayah dengan tingkat perkembangan sedang dan rendah adalah cenderung acak. Wilayah prioritas pengembangan I meliputi Kecamatan Giritontro, Batuwarno, Eromoko, Manyaran, Jatiroro, Kismantoro, Slogohimo, dan Jatipurno. Wilayah prioritas pengembangan II meliputi Kecamatan Giriwoyo, Tirtomoyo, Nguntoronadi, Sidoharjo, Bulukerto, Girimarto, Karangtengah, dan Paranggupito. Wilayah pengembangan III meliputi Kecamatan Pracimantoro, Baturetno, Wuryantoro, Selogiri, Wonogiri, Ngadirojo, Purwantoro, dan Jatisrono..

Zuswanto (2014) Analisis Spasial Pertumbuhan Ekonomi Kawasan KEDUNGSAPUR Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pertumbuhan ekonomi secara keruangan dikawasan KEDUNGSAPUR, mengetahui sektor apa yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta mengetahui factor-faktor geografi apa yang mempengaruhi pola pertumbuhan ekonomi di kawasan KEDUNGSAPUR. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB, PDRB per kapita, data

kependudukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder yang menggunakan alat analisis antara lain: pertumbuhan ekonomi, indeks Wiliamson, LQ, dan Analisis Spasial (pendekatan komparasi keruangan). Hasil penelitian ini berdasarkan analisis pertumbuhan ekonomi kawasan strategis KEDUNGSAPUR kabupaten yang mengalami pertumbuhan ekonomi relatif tinggi adalah Kabupaten Grobogan. Berdasarkan analisis percepatan pembangunan dengan tipologi klassen, diperoleh kawasan KEDUNGSAPUR adalah masuk dalam kuadran II yaitu daerah maju dengan pesat. Berdasarkan analisis dengan menggunakan LQ diperoleh kesimpulan bahwa sektor bangunan yang menjadi keunggulan di KEDUNGSAPUR. Hal ini ditunjukkan dengan adanya empat daerah yang menjadikan sektor bangunan menjadi sektor basis yaitu Kabupaten Kendal, Semarang, Kota Semarang dan Kota Salatiga, selain sektor bangunan KEDUNGSAPUR juga memiliki sektor yang menjadi sektor unggulan lainnya yaitu sektor listrik, gas, dan air bersih karena sektor tersebut menjadi sektor basis di tiga daerah. Sektor industri pengolahan yang merupakan sektor yang kontribusinya tertinggi di KEDUNGSAPUR, hanya menjadi sektor basis di dua daerah yaitu Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang.

Tabel 1.2 Perbandingan Antar Penelitian

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Didit Hasto H.(2005)	Kajian Tingkat Perkembangan Wilayah Untuk Pemilihan Wilayah Prioritas Pengembangan di Kabupaten Wonogiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukur derajat kesenjangan perkembangan wilayah 2. Mengetahui pola sebaran 3. Menentukan wilayah prioritas pengembangan 	Analisis data sekunder	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadi kesenjangan wilayah di Kabupaten Wonogiri hal ini ditunjukkan dari perbedaan nilai variable yang menyebabkan tingkat perkembangan wilayah yang berkategori maju dan tertinggal sangatlah mencolok. 2. Hasil perhitungan dengan menggunakan indeks Gini terhadap wilayah dengan perkembangan sedang adalah sebesar 0,95, wilayah dengan perkembangan rendah 0,96 angka tersebut mendekati angka 1 yang berarti pola persebaran wilayah dengan tingkat perkembangan sedang dan rendah

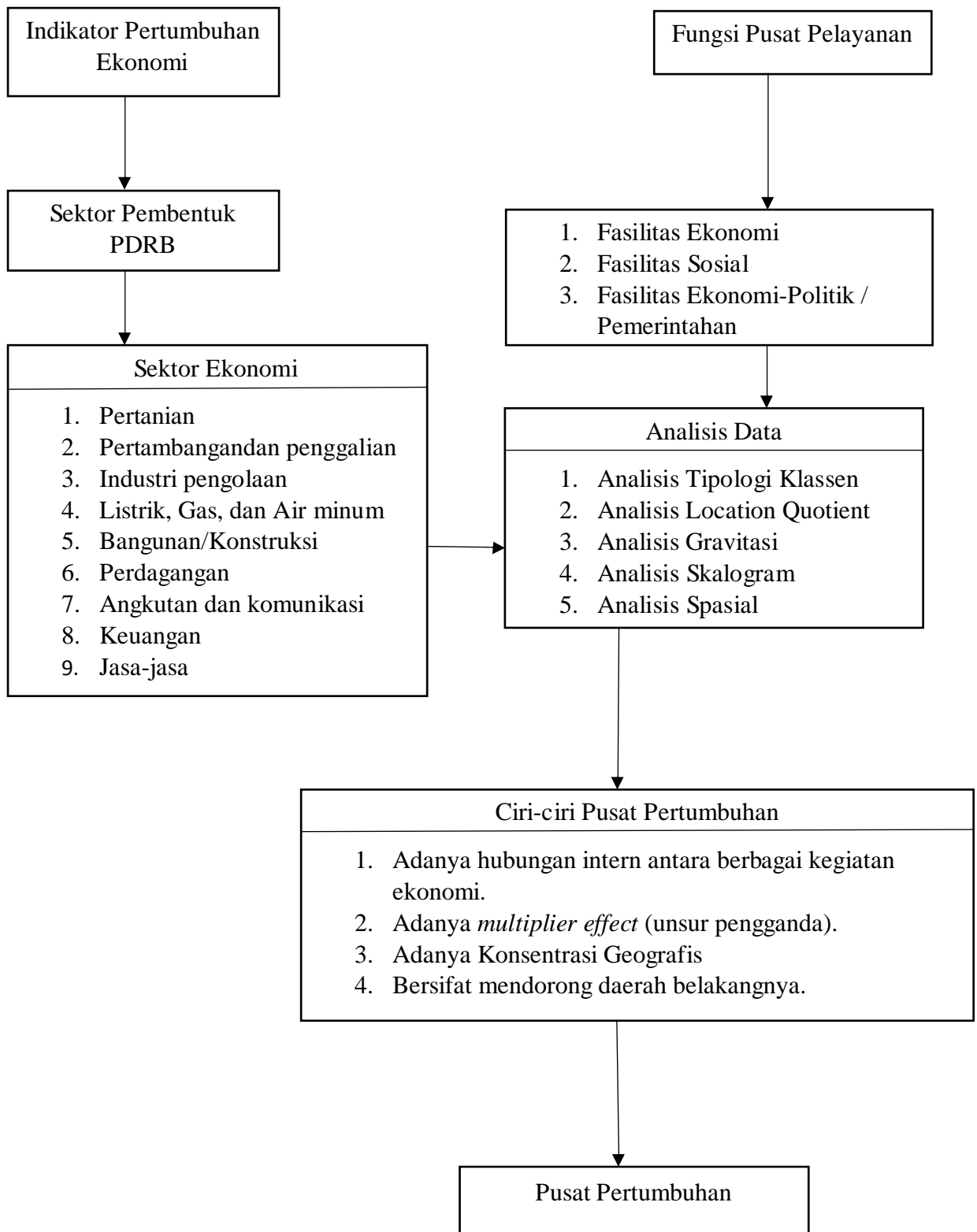
				<p>adalah cenderung acak.</p> <p>3. Wilayah prioritas pengembangan I meliputi Kecamatan Giritontro, Batuwarno, Eromoko, Manyaran, Jatiro, Kismantoro, Slogohimo, dan Jatipurno. Wilayah prioritas pengembangan II meliputi Kecamatan Giriwoyo, Tirtomoyo, Nguntoronadi, Sidoharjo, Bulukerto, Girimarto, Karangtengah, dan Paranggupito. Wilayah pengembangan III meliputi Kecamatan Pracimantoro, Baturetno, Wuryantoro, Selogiri, Wonogiri, Ngadirojo, Purwantoro, dan Jatisrono.</p>
Zuswanto (2014)	Analisis Spasial Pertumbuhan Ekonomi Kawasan	1. Mengetahui Pola pertumbuhan ekonomi di kawasan	Analisis data sekunder menggunakan	1. Pola pertumbuhan ekonomi kawasan KEDUNGSEPUR termasuk kedalam kuadran II yaitu

	KEDUNGSEPUR Provinsi Jawa Tengah	KEDUNGSEPUR 2. Mengetahui sector apa yang mempengaruhi pola pertumbuhan ekonomi 3. Mengetahui factor-faktor geografi yang mempengaruhi pola pertumbuhan	(pertumbuhan ekonomi, tipologi klassen, indeks Williamson, LQ, Analisis Spasial)	daerah maju dengan pesat. 2. Sektor pertumbuhan ekonomi kawasan KEDUNGSEPUR yang paling dominan adalah sektor bangunan industri pengolahan, gas, listrik dan air bersih 3. Faktor geografi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kawasan KEDUNGSEPUR adalah ruang.
Adi Yusuf I. (2014)	Analisis Penentuan Pusat Pertumbuhan pada setiap Fungsi Pusat Pelayanan di Kabupaten Boyolali.	1. Mengetahui pola Pertumbuhan. 2. Mengetahui sektor unggulan. 3. Menentukan wilayah Prioritas Pusat pertumbuhan.	Analisis Data Sekunder menggunakan (tipologi klassen, LQ, Skalogram dan Gravitasi)	

1.6 Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah dewasa ini meningkatkan motivasi daerah untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan yang tinggi melalui pemberdayaan potensi yang dimiliki di daerah tersebut. Upaya suatu daerah meningkatkan pertumbuhan ekonomi terkadang menjadi sebuah dilema, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi disuatu daerah biasanya menyebabkan daerah yang kurang mempunyai potensi menjadi tertinggal. Salah satu kebijakan pemerintah Kabupaten Boyolali dalam mengurangi kesenjangan tersebut adalah dengan dibentuknya Fungsi Pusat Pelayanan yang dimaksudkan untuk mendorong Kecamatan yang memiliki potensi untuk berkembang sehingga mampu mempengaruhi Kecamatan disekitarnya untuk ikut berkembang.

Kebijakan lain yang bisa digunakan adalah dengan pembentukan pusat pertumbuhan yang menyebar. Kebijakan ini diharapkan mampu untuk mengurangi ketimpangan yang ada di suatu wilayah. Pusat pertumbuhan harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) Adanya hubungan intern antar kegiatan ekonomi, (2) Adanya *multiplier effect*, (3) Adanya konsentrasi geografis, dan (4) Bersifat mendorong daerah belakangnya. Sektor pembangunan yang dominan ditentukan berdasarkan potensi yang menonjol pada setiap wilayah sehingga prioritas pengembangan setiap Kecamatan diarahkan sesuai potensi yang dimiliki. Dengan mengetahui potensi Kecamatan di setiap fungsi pusat pelayanan diharapkan Kecamatan tersebut mampu menjadi salah satu pusat pertumbuhan yang mampu menjadi pemicu kecamatan lain untuk terkena dampak dari perkembangan tersebut. Dengan demikian hasilnya dapat menjadi masukan dalam perencanaan pengembangan wilayah bagi pemerintah. Untuk lebih jelasnya dalam memahami kerangka berpikir lihat gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1.1 Diagram Pemikiran

Sumber:Penulis,2014.

1.7 Metode Penelitian

1) Data yang dibutuhkan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi – instansi yang bersangkutan dan ada hubungannya dengan penelitian. Adapun data yang dikumpulkan meliputi:

- 1) Data perekonomian daerah (PDRB di rinci per sektor, PDRB perkapita, laju pertumbuhan,
- 2) Data Infrastruktur (fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, Pasar/pertokoan, Jalan, terminal, dsb).
- 3) Data Sumber Daya Alam (SDA)
- 4) Data kependudukan (jumlah, kepadatan penduduk, rasio ketergantungan, tingkat pertumbuhan, mata pencaharian penduduk, dll.)

2) Pemilihan Daerah Penelitian

Unit analisis yang digunakan adalah 19 Kecamatan yang berada di Kabupaten Boyolali yang dibagi kedalam (5) fungsi pusat pelayanan. Pemilihan kabupaten Boyolali sebagai daerah penelitian ini didasari oleh pertimbangan sebagai berikut:

- a) Kabupaten Boyolali terletak diantara segitiga wilayah Yogyakarta – Solo – Semarang (Joglosemar) yang merupakan salah satu pusat perekonomian di pulau Jawa, serta rencana pembangunan jalan Tol Solo – Semarang dan Solo – Ngawi yang melintas di Kabupaten Boyolali sehingga Kabupaten Boyolali berpotensi berkembang khususnya pada sektor ekonomi.
- b) Adanya ketimpangan PDRB antar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Boyolali (lihat tabel 1) yang salah satunya disebabkan oleh tidak meratanya pusat pertumbuhan yang ada di Kabupaten Boyolali. Sehingga diperlukan pusat-pusat pertumbuhan baru yang mampu mendorong berkembangnya daerah disekitarnya.

3) Analisis data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis untuk menjawab tujuan yang akan dicapai. Alat analisis itu meliputi: Tipologi Klassen Untuk menjawab tujuan tang pertama yaitu mengetahui pola pertumbuhan ekonomi, *Location Quotient (LQ)* untuk menjawab tujuan yang kedua yaitu mengetahui sektor unggulan, Analisis Gravitasi, dan Analisis Skalogram digunakan untuk menjawab tujuan yang ketiga. Setelah mengetahui jawaban dari ketiga tujuan itu selanjutnya digunakan analisis Spasial untuk menjawab tujuan keempat.

a) Analisis Tipologi Klassen

Metode analisis yang digunakan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu tujuan pertama, untuk mengetahui pola pertumbuhan di masing-masing Kecamatan, untuk tujuan ini digunakan Analisis Tipologi Klassen. Alat analisis ini membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB per kapita daerah sehingga didapatkan pola pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah yang diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok.

1. *Rapid growth region*, yaitu daerah cepat maju dan cepat berkembang, dimana laju pertumbuhan PDRB dan tingkat PDRB per kapita suatu daerah lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita wilayah di atasnya dalam penelitian ini adalah Kabupaten Boyolali.
2. *Rertated region*, yaitu daerah maju tapi tertekan, dimana daerah yang relatif telah maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhan menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan.
3. *Growing region*, daerah berkembang cepat dengan potensi pengembangan sangat besar, tetapi masih belum diolah sepenuhnya secara baik. Tingkat pertumbuhan daerah sangat tinggi, namun tingkat pertumbuhan PDRB per kapita yang

mencerminkan tahap pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih relatif rendah.

4. *Relative backward region*, yaitu daerah yang relatif masih tertinggal, daerah ini masih mempunyai tingkat pertumbuhan dan PDRB per kapita relatif rendah atau berada di bawah rata-rata.

Rumus awal untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi daerah penelitian digunakan rumus sebagai berikut :

$$REG_{(t-1,t)} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

REG= Laju pertumbuhan di wilayah tertentu.

PDRB_t= PDRB tahun tertentu.

PDRB_{t-1}= PDRB Satu Tahun Sebelumnya.

Pendapatan/kpt (Y) Laju Pertumbuhan (R)	Y1 > Y2	Y1 < Y2
R1 > R2	Kuadran I Daerah maju dan tumbuh cepat (<i>Rapid growth region</i>)	Kuadran II Daerah berkembang cepat (<i>Growing region</i>)
R1 < R2	Kuadran III Daerah maju tapi tertekan (<i>Rertated region</i>)	Kuadran IV Daerah relatif tertinggal (<i>Relative backward region</i>)

Sumber: Kuncoro (2013)

Catatan:

R₁ = Laju pertumbuhan PDRB Kecamatan

R₂ = Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten

Y₁ = PDRB per Kapita Kecamatan rata-rata

Y₂ = PDRB per Kapita Kabupaten rata-rata

b) Analisis *Location Quotient*

Alat analisis *Location Quotient* (LQ) membandingkan besarnya peranan sektor di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut di tingkat daerah yang lebih luas. Analisis ini digunakan untuk menjawab tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui sektor unggulan di tiap Kecamatan. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki daerah tersebut yaitu sektor basis dan sektor non basis. Untuk menentukannya digunakan rumus sebagai berikut:

$$LQ = \frac{si/S}{ni/N}$$

Dimana:

LQ : Indeks *Location Quotient*

si: PDRB sektor i di Kecamatan *a*

S: PDRB total di Kecamatan *a*

ni: PDRB sektor i di Kabupaten Boyolali

N: PDRB total di Kabupaten Boyolali

Dari hasil perhitungan yang diperoleh dapat diartikan dalam tiga kategori, yaitu:

1. Bila nilai $LQ < 1$, maka hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut bukan sektor basis, yang berarti bahwa sektor tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan di wilayahnya sendiri, artinya sektor tersebut bukan sektor unggulan..
2. Bila nilai $LQ = 1$, Hal ini menunjukkan sektor tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan di wilayahnya sendiri.
3. Bila nilai $LQ > 1$, menunjukkan bahwa sektor tersebut adalah sektor basis, berarti selain sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhan di wilayahnya sendiri dan mempunyai potensi ekspor ke wilayah yang lain.

c) Analisis Gravitasi

Analisis gravitasi adalah salah satu model yang umum dipakai dalam menjelaskan fenomena interaksi wilayah. Dalam model ini, daerah dianggap

sebagai suatu massa. Hubungan antar daerah disamakan dengan hubungan antar massa. Massa wilayah juga mempunyai daya tarik, sehingga terjadi saling mempengaruhi antar daerah sebagai perwujudan kekuatan tarik-menarik antar daerah. Karena kenyataan ini maka model gravitasi dapat diterapkan sebagai salah satu model analisis. Model ini pada dasarnya merupakan bentuk analogia fenomena hukum fisika yang ditemukan oleh Newton yang kemudian dikembangkan untuk ilmu sosial yang dapat membantu perencanaan wilayah untuk memperkirakan daya tarik suatu lokasi dibandingkan dengan lokasi lain disekitarnya. Hal ini biasadimanfaatkan untuk simulasi apakah suatu fasilitas yang dibangun padalokasitertentu akan menarik cukup pelanggan atau tidak. (Tarigan, 2004).

Rumus dasar perhitungan interaksi antar wilayah adalah :

$$I = K \frac{Pa.Pb}{(Dab)^2}$$

Keterangan :

I = Interaksi

Pa = Jumlah Penduduk Kota a

Pb = Jumlah Penduduk kota b

Dab= Jarak kota a dan b

K = Bilangan Konstan

Jika hasil dari perhitungan gaya tarik atau bentuk interaksi dari satu wilayah ke wilayah semakin tinggi itu berarti frekuensi hubungan sosial, ekonomi dan sebagainya antara kedua tempat tersebut akan semakin tinggi pula begitupun sebaliknya, Jika nilai interaksi semakin kecil menunjukan frekuensi hubungan sosial,ekonomi dan sebagainya antar kedua wilayah itu semakin kecil juga.

Tabel 1.3 Contoh Tabel Interaksi Antar Kecamatan di Kabupaten Boyolali

No	Kecamatan	Interaksi	Peringkat
----	-----------	-----------	-----------

d) Analisis Skalogram

Metode skalogram dilakukan untuk mengetahui pusat pelayanan berdasarkan jumlah dan jenis unit fasilitas pelayanan yang ada dalam setiap

daerah. Asumsi yang dipakai adalah bahwa wilayah yang memiliki ranking tertinggi adalah lokasi yang dapat ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan (Amas Yamin, dkk dalam Pardede, 2008). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi peranan suatu kecamatan berdasarkan pada kemampuan masing-masing kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Asumsinya jika suatu kecamatan mempunyai berbagai fasilitas yang relatif lengkap di bandingkan dengan kecamatan lainnya, maka kecamatan tersebut mampu berperan sebagai suatu pusat pertumbuhan pada kawasan tersebut. Menurut Blakely (1994), alat analisis skalogram membahas mengenai fasilitas perkotaan yang dimiliki suatu daerah sebagai indikator difungsikannya daerah tersebut sebagai salah satu pusat pertumbuhan.

Dalam penelitian ini, alat analisis skalogram akan digunakan untuk menghitung tingkat kelengkapan fasilitas kecamatan yang akan dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu: 1) Fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, 2) Fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas sosial.

Prosedur pengerjaan metode Skalogram Guttman adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi semua Kecamatan yang ada.
2. Membuat urutan fasilitas yang ditemukan berdasarkan frekuensi yang ditemukan pada bagian atas.
3. Membuat garis baris dan kolom sehingga lembar kerja tersebut membentuk matriks yang menampilkan fasilitas yang ada pada masing-masing pusat pelayanan atau kota.
4. Menggunakan tanda (1) pada sel yang menyatakan keberadaan suatu fasilitas, dan tanda (0) pada sel yang jmenyatakan ketiadaan suatu fasilitas.
5. Menyusun ulang baris dan kolom berdasarkan frekuensi keberadaan fasilitas, semakin banyak fasilitas yang didapati pada suatu permukiman maka permukiman tersebut berada pada urutan atas.

6. Mengidentifikasi peringkat atau hirarki pemukiman yang dapat diinterpretasikan berdasarkan jumlah keberadaan fasilitas pada suatu pemukiman. Semakin tinggi jumlahnya, maka hierarki pemukiman tersebut akan semakin tinggi. Untuk menentukan hierarki ini digunakan metode sturgess.

$$\text{Interval Kelas} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{3}$$

7. Setelah diketahui hierarki Selanjutnya, nilai masing-masing objek dimasukkan ke dalam tabel skalogram yaitu tinggi-sedang-rendah, dengan objek penelitian sebagai barisnya. Berikut contoh tabel yang akan digunakan bisa dilihat pada tabel 1.4.

Tabel 1.4 Contoh Tabel Hierarki Pusat Pelayanan di Kabupaten Boyolali

No	Kecamatan	Fasilitas Sosial	Fasilitas Ekonomi	Jumlah	Hierarki	Keterangan

e) Analisis Spasial

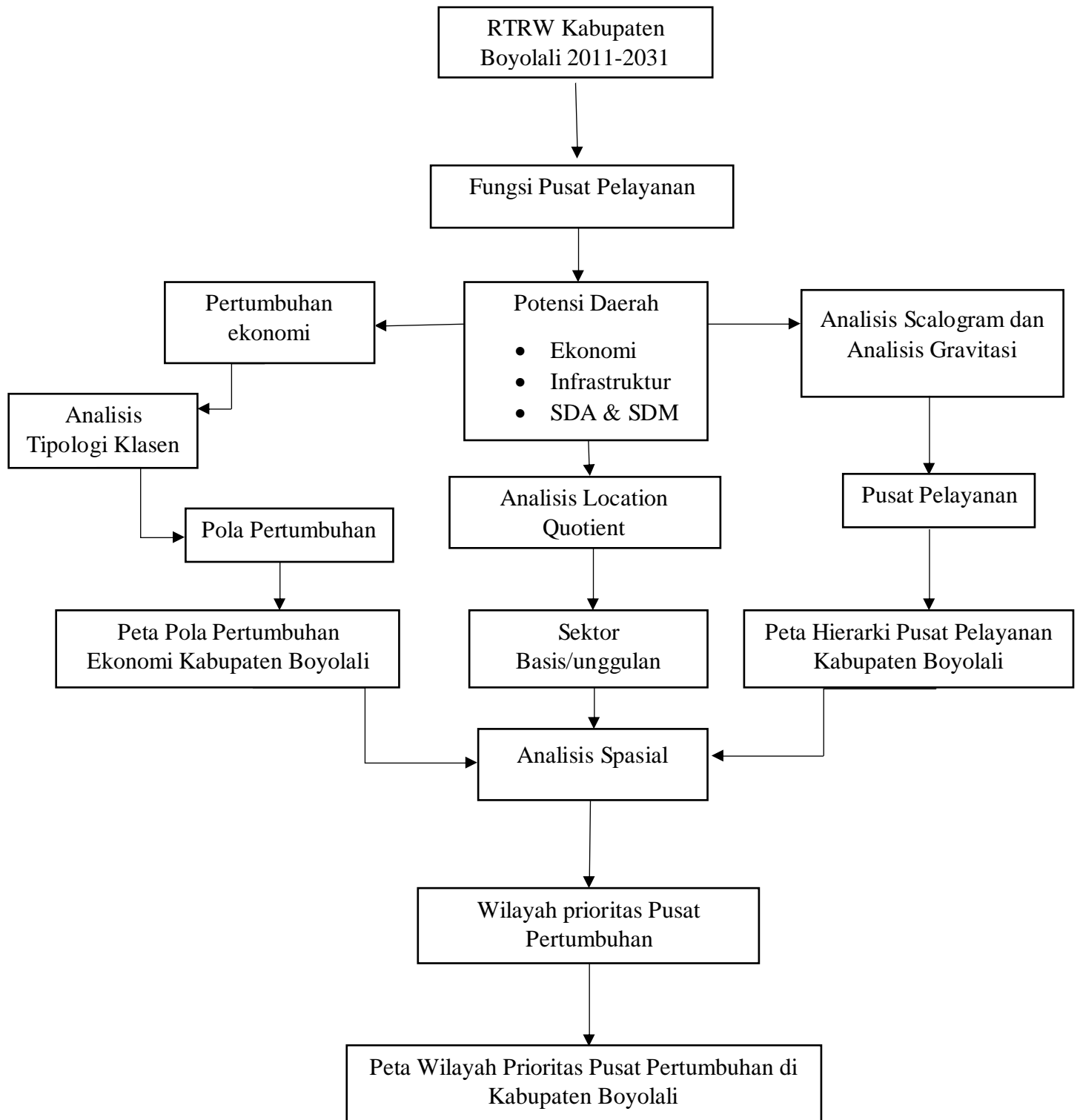
Analisis Spasial mempelajari perbedaan lokasi mengenai sifat-sifat penting di dalam suatu wilayah/ruang. Ahli geografi akan bertanya faktor-faktor apa yang paling dominan mempengaruhi perkembangan suatu wilayah serta berusaha mencari faktor-faktor yang menentukan pola penyebaran serta cara mengubah pola sehingga dicapai penyebaran yang lebih baik, efisien, dan wajar. Analisis suatu masalah menggunakan pendekatan ini dapat dilakukan dengan pertanyaan 5W 1H. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dalam analisis keruangan yang harus diperhatikan adalah persebaran penggunaan ruang yang telah ada dan penyediaan ruang untuk berbagai kegiatan pembangunan yang direncanakan (Sumarmi, 2012).

Pada tahap analisis ini hasil dari ketiga pertanyaan sebelumnya yaitu: Pola pertumbuhan ekonomi, Sektor ekonomi unggulan, dan Pusat pelayanan dianalisis dengan menggunakan pendekatan keruangan yang mempunyai 9 tema. Dari kesembilan tema tersebut digunakan analisis interaksi dan komparasi keruangan untuk menganalisis potensi dan daya saing Kecamatan sebagai pusat

pertumbuhan. Analisis Interaksi Keruangan, menekankan pada interaksi antar ruang. Hubungan timbal balik antara ruang yang satu dengan yang lain mempunyai variasi yang sangat besar, sehingga upaya mengenali faktor-faktor pengontrol interaksi menjadi sedemikian penting. Analisis Komparasi keruangan, merupakan suatu analisis yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan atau keunggulan suatu ruang dibandingkan dengan ruang yang lain. Hal ini sangat penting dilaksanakan dalam studi banding yang mendalam mengenai suatu wilayah dalam rangka mempelajari kelebihan-kelebihan wilayah lain untuk digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan pengembangan wilayah, sehingga wilayahnya dapat mengalami kemajuan yang lebih besar.

Selanjutnya berdasarkan uraian secara singkat mengenai metode penelitian yang dipakai maka diperoleh suatu kerangka penelitian yang mempunyai tahap-tahap sebagai berikut. Pertama, melakukan pendiskripsian secara umum tentang potensi yang dimiliki meliputi perekonomian, infrastruktur, sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia setiap Kecamatan di Kabupaten Boyolali. Kedua, menentukan sektor prioritas di setiap Kecamatan dengan menggunakan analisis *Location Quotient* yaitu metode untuk menghitung perbandingan relatif sumbangan nilai tambah sebuah sektor di suatu wilayah terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan dalam skala wilayah yang lebih luas. Ketiga, menentukan wilayah pusat pelayanan menggunakan analisis skalogram dan analisis gravitasi, dimana pada tahap ini akan dihitung interaksi antar Kecamatan di Kabupaten Boyolali serta menghitung kelengkapan fasilitas yang ada di setiap Kecamatan. Keempat, menggunakan Analisis Tipologi Klasen untuk menentukan pola pertumbuhan masing-masing kecamatan di Kabupaten Boyolali. Setelah diketahui sektor prioritas, pusat pelayanan, dan pola pertumbuhan kemudian dilakukan analisis Spasial sehingga didapatkan tingkat daya saing kecamatan sebagai pusat pertumbuhan yang digunakan untuk mengidentifikasi wilayah mana yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhandi Kabupaten boyolali. Untuk lebih jelasnya akan di diterangkan pada diagram penelitian dibawah ini.

Gambar 1.2 Diagram Penelitian



Sumber : Penulis,2014.

1.8 Batasan Operasional

- Analisis Grafitasi adalah analisis yang digunakan untuk menghitung interaksi antar kota.
- Analisis Location Quetion adalah analisis yang digunakan untuk membandingkan besarnya peranasektor di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebutdi tingkat daerah di atasnya.
- Analisis Skalogram adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui pusat pelayanan berdasarkan jumlah dan jenis unit fasilitas pelayanan yang ada dalam setiap daerah.
- Analisis Tipologi Klassen adalah analisis yang digunakanuntuk mengetahui pola pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah.
- *Daya Saing Daerah* adalah kemampuan perekonomian suatu daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.(PPSK BI, 2008)
- Fasilitas pelayanan ekonomi adalah segala bentuk pelayanan yang diselenggarakan pemerintah maupun non pemerintah yang mempunyai pengaruh langsung atau nyata sesuai dengan fngsi pelayanan ekonomi pada penggunaanya (Conyers, 1991). Dalam penelitian ini fasilitas pelayanan ekonomi meliputi perdagangan (Swalayan, pasar, pertokoan, Rumah makan, kios, dan Hotel) dan keuangan perbankan (BRI, Bank Umum, BPR, BKK, dan Koperasi).
- Fasilitas pelayanan sosial adalah pelayanan yang diberikan pemerintah atau di arahkan oleh pemerintah dan dimaksudkan untuk memperbaiki tingkat kehidupan penduduk (Huisman, 1987). Dalam penelitian ini fasilitas pelayanan sosial meliputi fasilitas pendidikan(PT, SLTA, SLTP, SD, dan TK), kesehatan(RS, RB, Poliklinik, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Praktek Dokter, dan tempat ibadah(Masjid, Gereja, Vihara/Kuil, Mushola).
- *Potensi* adalahkemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan(KBBI).

- *Potensi Wilayah* adalah segala sesuatu yang dimiliki suatu wilayah yang memungkinkan untuk dikembangkan sehingga mampu memberi nilai tambah pada daerah tersebut.
- *Pusat Pertumbuhan* adalah wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat sehingga karena kepesatannya itu dijadikan sebagai pusat pembangunan yang mampu mempengaruhi kawasan – kawasan lain disekitarnya (sjafrizal, 2012).
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten (RTRW Kab. Boyolali th 2011-2031).
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan (RTRW Kab. Boyolali th 2011-2031).
- Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKL_p) adalah pusat pelayanan kawasan yang dipromosikan untuk kemudian hari ditetapkan sebagai PKL (RTRW Kab. Boyolali th 2011-2031).
- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa (RTRW Kab. Boyolali th 2011-2031).
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. (RTRW Kab. Boyolali th 2011-2031).
- Ruang adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfer tempat hidup manusia, tumbuhan, dan hewan.
- *Wilayah* didefinisikan sebagai suatu unit geografis dengan batas-batas tertentu dimana komponen-komponen didalamnya memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional satu dengan yang lainnya dimana komponen - komponen tersebut memiliki arti di dalam pendiskripsian perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pembangunan (Yunus, 1991).